



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON  
Nomor 38/PUU/PAN.MK/AP3/08/2021**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **dua** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh satu** pukul **00:00** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**1. Partai Bulan Bintang (PBB)**, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; **2. Partai Beringin Karya (Berkarya)**, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal Badaruddin A.P., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; **3. Partai Perindo (Persatuan Indonesia)**, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III; dan **4. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Agustus 2021 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Senin** tanggal **enam** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh satu** pukul **15:23** WIB WIB.

**Panitera  
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
AP3 Nomor 38/PUU/PAN.MK/AP3/08/2021

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

- Pemohon : 1. Partai Bulan Bintang (PBB), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; 2. Partai Beringin Karya (Berkarya), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal Badaruddin A.P., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; 3. Partai Perindo (Persatuan Indonesia), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III; dan 4. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.
- Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- No APPP : 38/PUU/PAN.MK/AP3/08/2021

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Surat Kuasa	1	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
5	Alat Bukti	1	
6	Akta Nomor 4 tanggal 5 Nopember 1998 tentang Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang	1	
7	Pengumuman Menteri Kehakiman No. M.UM.06.08-77 tanggal 16 Pebruari 1999 tentang Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik	1	
8	SK Kumham Nomor M.HH - 06.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat PBB Periode 2019-2024	1	
9	Akta Nomor 02 tanggal 14 Juli 2020 tentang Perubahan AD dan ART Partai Beringin Karya	1	
10	SK Kumham No. M.HH-16.AH.1101 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART Partai Beringin Karya (Berkarya)	1	
11	SK Kumham No. M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya Periode 2020-2025	1	
12	Akta Nomor 5 tanggal 18 September 2014 tentang Pernyataan Keputusan Team Ad Hoc Partai Perindo (Persatuan Indonesia)	1	
13	SK Kumham No. M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPP Perindo	1	

14	SK Kumham No. M.HH - 07 .AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia)	1	
15	Akta Nomor 18 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Risalah Rapat Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus Partai Solidaritas Indonesia	1	
16	SK Kumham No. M.HH - 09.AH.11.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Periode 2019-2024	1	
17	Permohonan bertanggal 26 Agustus 2021	1 rangkap	1 Asli
18	Surat Kuasa bertanggal 25 Agustus 2021	1 rangkap	Masing-masing 1 rangkap Asli (Partai Bulan Bintang, Partai Berkarya, Partai Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia)
19	Daftar Alat Bukti bertanggal 27 Agustus 2021 (P-1 sd P-26)	1 rangkap	Asli
20	Bukti Fisik P-1 sd P-26	1 rangkap	Masing-masing 1 rangkap dan sudah dileges (P-1 sd P-26)
21	Berita Acara Sumpah Advokat serta Identitas Kuasa Hukum	1 rangkap	copy
22	Softcopy Permohonan, Surat Kuasa Khusus, Daftar Alat Bukti, dan Scan Bukti	15 files (PDF dan Ms Word)	Diterima melalui email MKRI (Kamis, 2 September 2021 pukul 20.47 WIB)

**Panitera,  
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.